

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dark tourism semakin mendapat perhatian dalam ranah akademik maupun publik, merujuk pada aktivitas kunjungan ke lokasi yang berkaitan dengan kematian, penderitaan, atau tragedi (Karadzhov, 2025). Istilah *dark tourism* pertama kali diperkenalkan oleh Foley dan Lennon melalui sebuah editorial dalam *International Journal of Heritage Studies*, yang membahas kajian mengenai perspektif baru terkait fenomena tersebut (Fabros, Lopez, & Roma, 2023). Sekitar 20 tahun yang lalu, beberapa tulisan yang dimuat dalam edisi awal *International Journal of Heritage Studies* memperkenalkan dan mengembangkan dua konsep yang saling berhubungan, yaitu pariwisata kelam (*dark tourism*) dan *thanatourism* sebagai bagian dari kajian warisan budaya (Light, 2017). Mengingat *dark tourism* masih tergolong sebagai bentuk industri pariwisata yang relatif baru, kajian akademis terhadapnya baru dimulai pada pertengahan tahun 1990-an (Patria, Puisetya, & Tarigan, 2023).

Dark tourism merupakan istilah yang muncul pada akhir abad ke-19 untuk menjelaskan aktivitas perjalanan ke suatu tempat baik yang benar-benar ada maupun yang hanya memiliki keterkaitan dengan peristiwa kematian, penderitaan, bencana, serta nuansa kelam atau menyeramkan (Ramlee, Hussin, & Hashim, 2018). *Dark tourism* menjadi jenis pariwisata yang semakin berkembang dan diminati oleh kalangan akademis serta publik, yang melibatkan kunjungan ke lokasi-lokasi yang memiliki kaitan dengan peristiwa kematian, kesengsaraan, atau bencana (Karadzhov, 2025). Konsep ini tidak hanya sekadar memberikan hiburan, melainkan juga mengandung unsur edukasi, refleksi, bahkan sebagai renungan terhadap aspek-aspek kehidupan yang lebih serius dan emosional (Dewi, 2023). Di sisi akademis, *dark tourism* digunakan sebagai istilah resmi untuk menyebut berbagai destinasi di seluruh dunia yang berfungsi sebagai ruang peringatan atau pengingat akan peristiwa tragis dan menyedihkan dalam sejarah umat manusia (Patria et al., 2023).

Berdasarkan berbagai definisi yang dijelaskan oleh para ahli, *dark tourism* pada dasarnya memiliki pemahaman yang serupa, yaitu sebuah bentuk pariwisata yang mengajak wisatawan mengunjungi lokasi-lokasi yang identik dengan kesedihan dan penderitaan. Daya tarik *dark tourism* berkaitan dengan peristiwa tragis dalam sejarah, situs-situs tragedi, ataupun area terdampak bencana (Çilginoğlu & Dalahmetoğlu, 2024). Kawasan yang mengalami bencana sering kali menarik minat wisatawan karena adanya transformasi pada lanskap wilayah, dinamika sosial, serta perubahan dalam aspek budaya dan ekonomi. Lokasi semacam ini kemudian berkembang menjadi destinasi wisata tersendiri (Wulandari, Hasyim, & Rachmawati, 2024).

Beberapa daya tarik wisata kelam bersejarah di Indonesia diakui keberadaannya karena memiliki keterhubungan dengan peristiwa mengerikan pada masa lalu, antara lain Lubang Buaya di Jakarta, Kamp Pengungsi Vietnam di Batam, Desa Trunyan di Bali, dan Lawang Sewu di Semarang (Lawby, Fedora, & Thio, 2022). Namun, di Indonesia, meskipun memiliki potensi destinasi *dark tourism* yang cukup besar baik dari segi kondisi geografis maupun warisan sosial-historisnya, jenis pariwisata ini masih belum banyak dikenal dan dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktornya adalah rendahnya minat wisatawan terhadap bentuk wisata semacam ini (Asyraf, Malihah, & Andari, 2022).

Salah satu wisata yang berpotensi menjadi *dark tourism* terletak di Kabupaten Sidoarjo yang dikenal luas sebagai "kota lumpur". Penyebutan ini disebabkan oleh bencana semburan lumpur panas Lapindo yang terjadi di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan di area sekitarnya (Sukmana & Sinduwiatmo, 2017). Peristiwa semburan Lumpur Lapindo terjadi di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo, dan meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Jabon, Tanggulangin, dan Porong. Kejadian ini bermula pada bulan Mei 2006 dan telah menggenangi wilayah seluas kurang lebih 650 hektar, mencakup enam desa yang terdampak langsung (Maulana & Bagus, 2019). Lumpur lapindo terbentuk karena adanya peristiwa "ketidaksengajaan" pengeboran yang

mengakibatkan munculnya semburan lumpur panas yang sampai saat ini masih terus mengeluarkan semburan lumpurnya.

Peristiwa sejarah semburan lumpur lapindo dimulai sejak 29 Mei 2006, tepat 3 hari setelah PT Lapindo Brantas melakukan proyek pengeboran yaitu pada tanggal 26 Mei 2006 (Zannah & Sudarti, 2021). Semburan pertama diketahui memiliki tinggi sekitar delapan meter. Upaya pertama yang dilakukan PT Lapindo Brantas adalah dengan mendatangkan alat *snubbing*, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk melakukan perawatan atau perbaikan sumur tanpa harus mengangkat peralatan produksi di dalam sumur. Dengan harapan dapat menghentikan semburan lumpur panas ini. Namun, pada kenyataannya upaya ini gagal untuk menghentikan semburan lumpur panas. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2006 PT Lumpur Lapindo menghentikan upayanya dengan cara menghentikan proses dengan alat *snubbing* tersebut (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020). Dikutip dari (Suyadnya & Fatanti, 2017) sebanyak 1.873 warga akhirnya harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di lokasi penampungan. Kawasan desa yang sebelumnya hidup dengan aktivitas para pekerja pabrik pun berubah menjadi wilayah yang sunyi. Sebagian besar penduduk pindah, dan PLN memutuskan suplai listrik di area terdampak. Meski demikian, beberapa warga yang tetap bertahan berupaya melanjutkan hidup, salah satunya dengan memanfaatkan kawasan semburan lumpur sebagai tempat wisata alternatif .

Menurut kutipan dari (Shofwan & Nur'Aini, 2017) terdapat 12 desa yang terkena dampak dari munculnya bencana semburan lumpur lapindo. Namun dikutip dari *website* TunasHijau (2025) terdapat 16 desa yang terdampak semburan Lumpur Lapindo ini, termasuk juga fasilitas umum seperti jalan tol, sekolah, masjid, dan sebagainya. Lumpur Lapindo tidak hanya menenggelamkan desa-desa padat penduduk, bencana Lumpur Lapindo juga menyebabkan pabrik dan tambak ikan terendam lumpur (Suyadnya & Fatanti, 2017). Berbagai fasilitas seperti sekolah, pabrik, toko, kantor pemerintahan, hingga masjid tidak dapat diselamatkan. Selama bertahun-tahun, kasus ini telah menjadi objek investigasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga internasional. Namun demikian, persoalan mengenai tanggung jawab secara hukum maupun moral masih

menimbulkan perdebatan. Negara berperan menentukan kawasan yang harus dikosongkan sehingga penduduk dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya tanpa alternatif lain, bahkan kerap kali tanpa adanya mekanisme musyawarah terlebih dahulu (Novenanto, 2019). Kelompok masyarakat sipil dan organisasi pemerhati lingkungan terus mendesak penegakan keadilan atas kelalaian yang terjadi, sementara sebagian korban masih belum menerima kompensasi yang layak (Kementerian PUPR, 2020).

Semenjak ditinggalkan pemiliknya akibat terendam lumpur lapindo, bangunan-bangunan yang tersisa menjadi terbengkalai begitu saja bersama dengan hamparan lumpur yang semakin meluas. Daya tarik wisata sengaja dibangun untuk tujuan hiburan, tetapi wisata Lumpur Lapindo memiliki karakter yang berbeda. Ada upaya masyarakat untuk menjadikan kawasan Lumpur Lapindo ini sebagai wisata. Lumpur Lapindo dijadikan wisata atas inisiatif dari masyarakat sendiri, sebagai bentuk semangat untuk bangkit dari keterpurukan pascabencana. Melihat antusiasme para wisatawan yang datang dan menyaksikan wisata kelam Lumpur Lapindo, masyarakat merasa optimis bahwa kawasan ini dapat memberikan manfaat bagi mereka (Wahyu P & Shofwan, 2023).

Kawasan ini berkembang menjadi destinasi wisata atas inisiatif masyarakat sendiri sebagai bentuk upaya untuk bangkit dari keterpurukan setelah bencana terjadi (Bataha, Jannah, & Nazira, 2021). Lumpur lapindo bukan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, melainkan dikelola oleh paguyuban yang ingin membangkitkan kembali perekonomiannya. Paguyuban ini dibentuk oleh warga setempat yang berinisiatif untuk memanfaatkan fenomena lumpur lapindo sebagai peluang ekonomi. Kelompok masyarakat ini berupaya mencari penghasilan tambahan melalui berbagai kegiatan usaha yang dilakukan di sekitar lokasi bencana (Noviandari, Balafif, & Aprilia 2021).

Sebuah destinasi *dark tourism* tidak selalu memberikan kesan yang sama kepada setiap pengunjung. Suatu lokasi yang dianggap “tempat gelap” oleh seseorang, bisa saja tidak dipersepsikan demikian oleh orang lain. Karena itu, menurut para ahli, tidak ada tempat yang secara pasti dan mutlak dapat disebut sebagai tempat *dark tourism*, meskipun secara umum sudah diberi label demikian

(Magano, Fraiz-Brea, & Leite, 2022). Oleh karena itu diperlukan analisis sejauh mana Lumpur Lapindo menempati posisi spektrum *dark tourism* dan penilaian potensi wisata Lumpur Lapindo sebagai *dark tourism*.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dengan adanya Lumpur Lapindo yang dijadikan lokasi wisata, maka penulis ingin mengamati karakteristik Lumpur Lapindo agar dapat digolongkan ke dalam *dark tourism*, sehingga rumusan masalah yang dapat disusun adalah :

1. Bagaimana bentuk indikasi spektrum *dark tourism* yang ada pada kawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo?
2. Bagaimana potensi Lumpur Lapindo Sidoarjo untuk dapat dikembangkan sebagai *dark tourism*?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik wisata Lumpur Lapindo sebagai bagian dari *dark tourism*.

1. Mengidentifikasi unsur-unsur yang menunjukkan spektrum *dark tourism* di kawasan wisata Lumpur Lapindo.
2. Menganalisis potensi wisata Lumpur Lapindo sebagai *dark tourism* berdasarkan kondisi, keragaman, cakupan *dark history*, dan keunikan.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kontribusi Akademis bagi Pembaca
Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai aspek indikator *dark tourism* yang ada pada lokasi Lumpur Lapindo.
2. Manfaat bagi Masyarakat
Bagi masyarakat sekitar lokasi wisata Lumpur Lapindo, penelitian ini memberikan informasi mengenai nilai Lumpur Lapindo sebagai *dark tourism*.
3. Manfaat bagi Pengelola Wisata
Bagi para pengelola wisata, penelitian ini memberikan literasi mengenai kondisi Lumpur Lapindo yang diharapkan melalui penelitian ini, pengelola

dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Lumpur Lapindo yang ada di Kabupaten Sidoarjo.